

## Hambatan dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Albertus Hengka Nove

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak  
E-mail : [albertushengkanove@stakatnpontianak.ac.id](mailto:albertushengkanove@stakatnpontianak.ac.id)

Received: 20 June 2025

Accepted: 22 August 2025

Published: 1 September 2025

### ABSTRAK

Tugas utama guru Bimbingan dan Konseling (BK) adalah membantu peserta didik dalam mencapai tugas perkembangannya sesuai dengan Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik (SKKPD) pada setiap periode perkembangan. Oleh karena itu, guru BK memerlukan dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak, disertai sarana dan prasarana yang memadai. Namun, dalam praktiknya guru BK menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi guru BK dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling di lembaga pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara semi-terstruktur terhadap seorang guru dengan inisial "NR" di salah satu SMP Negeri di Kota Palangka Raya. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru BK menghadapi sejumlah kendala, antara lain kurangnya pemahaman stakeholders terhadap tugas dan fungsi guru BK; jumlah siswa yang melebihi 150 orang serta adanya siswa yang sulit diajak bekerja sama; beban tugas tambahan yang mengurangi fokus layanan; ruang BK yang belum terstandarisasi; perubahan kurikulum yang menuntut penyesuaian baru dalam format layanan; serta keterbatasan buku referensi untuk mendukung layanan bimbingan dan konseling.

**Kata Kunci:** Hambatan; Layanan; Bimbingan dan Konseling; Sekolah

---

## *Barriers in the Implementation of Guidance and Counseling Services in Schools*

### ABSTRACT

*The primary task of school counselors is to support students in achieving their developmental tasks in accordance with the Student Independence Competency Standards (SKKPD) at each stage of development. Therefore, school counselors require adequate support, collaboration with various stakeholders, and sufficient facilities and infrastructure to perform their roles effectively. However, in practice, school counselors often encounter various challenges. This study aims to identify the obstacles faced by school counselors in delivering guidance and counseling services in educational institutions. A qualitative approach was employed through semi-structured interviews with one counselor, identified by the initials "NR," at a public junior high school in Palangka Raya. Data analysis was conducted through data reduction, presentation, and verification. The findings reveal several challenges faced by the counselor, including limited understanding of stakeholders regarding the counselor's duties and functions; an excessive student-to-counselor ratio exceeding 150 students, with some students being uncooperative; additional workload that hinders service focus; counseling rooms that do not meet standardized requirements; curriculum changes requiring service format adjustments; and limited reference books to support guidance and counseling services.*

**Keywords:** Barriers; Services; Guidance and Counseling; School

## PENDAHULUAN

Semua siswa di sekolah berhak memperoleh layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan membantu mereka mengembangkan potensi secara optimal sekaligus memberikan dukungan bagi siswa yang mengalami kesulitan. Dengan demikian, membatasi layanan bimbingan dan konseling hanya kepada siswa yang bermasalah merupakan praktik yang kurang tepat. Untuk memenuhi Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik (SKKPD), layanan bimbingan dan konseling harus diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. SKKPD mencakup: (1) aspek religius, (2) aspek perilaku etis, (3) kematangan emosi, (4) kematangan intelektual, (5) kesadaran tanggung jawab sosial, (6) kesadaran gender, (7) pengembangan diri, (8) perilaku ekonomis, (9) wawasan dan kesiapan karier, (10) kematangan hubungan dengan teman sebaya, serta (11) kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga, khususnya bagi peserta didik di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MAN) (Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, 2016). Oleh karena itu, pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah menuntut keberadaan guru BK yang memiliki kualifikasi profesional.

Salah satu kompetensi guru BK tidak terlepas dari latar belakang pendidikannya, yaitu gelar sarjana Bimbingan dan Konseling yang diperoleh melalui kurikulum di perguruan tinggi. Guru BK dengan latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling umumnya lebih memahami peran serta tanggung jawabnya di sekolah dibandingkan dengan instruktur BK yang tidak memiliki kualifikasi tersebut. Sejak masa pendidikan, calon guru BK telah dibekali pemahaman mengenai tugas dan fungsi pekerjaannya di sekolah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kepala sekolah maupun pimpinan yayasan untuk merekrut guru BK

yang berasal dari lulusan sarjana Bimbingan dan Konseling.

Selain itu, guru BK dapat meningkatkan profesionalismenya melalui pengembangan diri dengan menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PPK) selama satu tahun. Guru BK yang telah menyelesaikan PPK memiliki kewenangan untuk membuka layanan bimbingan dan konseling di masyarakat, misalnya melalui klinik konseling, sebagaimana seorang dokter yang membuka praktik. Kompetensi yang dimiliki guru BK menjadi faktor penting dalam membantu peserta didik mencapai Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik (SKKPD).

Secara umum, terdapat empat kompetensi utama yang dituntut dari guru, yaitu: kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional (Afiah Mukhtar, 2020). Kompetensi kepribadian mencakup karakter guru BK, seperti empati, kasih sayang, kepedulian, ketulusan, ketenteraman, sikap mengayomi, responsif, serta kemampuan menjadi motivator bagi peserta didik untuk mencapai kemandirian (Ardimen, 2018). Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi guru BK dalam berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat, baik di lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari.

Kompetensi pedagogik mengacu pada kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran, termasuk dalam pemilihan pendekatan, teknik, strategi, dan media pembelajaran yang tepat (Somantri, 2018). Terakhir, kompetensi profesional merujuk pada keterampilan guru dalam memahami dan menyampaikan materi secara luas dan mendalam sehingga dapat dipahami, diaplikasikan, dan dikembangkan oleh peserta didik. Kompetensi profesional juga mencakup kemampuan guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal (Dudung, 2018).

Kemampuan guru Bimbingan dan Konseling (BK) mencakup tiga aspek utama, yaitu: (1) memahami secara utuh dan menyeluruh karakteristik peserta didik, (2) menguasai dasar-dasar teori bimbingan dan konseling, dan (3) menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang mendorong kemandirian peserta didik (Lisabe, 2019). Menurut Farozin et al. (2016) dan Kurnia et al. (2025), guru BK harus mampu memahami peserta didik yang mereka layani, khususnya dari aspek perkembangan rohani, fisik, emosi, intelektual, psikologis, dan sosial. Hal ini penting karena setiap jenjang pendidikan—mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK/MA—memiliki karakteristik serta aktivitas perkembangan yang berbeda. Oleh sebab itu, layanan bimbingan dan konseling perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan serta usia peserta didik.

Selain itu, guru BK dituntut untuk menguasai teori-teori dasar bimbingan dan konseling. Hal ini menjadi alasan pentingnya latar belakang pendidikan sarjana Bimbingan dan Konseling sebagai penunjang utama pelaksanaan layanan di sekolah. Kompetensi lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang berorientasi pada kemandirian peserta didik. Melalui layanan tersebut, diharapkan peserta didik mampu memperluas wawasan, memberdayakan diri dalam menyelesaikan masalah, serta mengembangkan potensi tanpa bergantung sepenuhnya pada guru BK.

Namun, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah sering kali tidak berjalan optimal meskipun guru BK telah memiliki kompetensi-kompetensi tersebut. Dukungan dari kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan kurikulum, pengelola sarana dan prasarana, orang tua, serta peserta didik sendiri menjadi faktor penting agar layanan dapat berfungsi dengan baik.

Apriatama (2018) menegaskan bahwa dalam praktiknya sering muncul kesalahpahaman mengenai bimbingan dan konseling, seperti: disamakan dengan pengajaran mata pelajaran, konselor dianggap sebagai “polisi sekolah”, hanya berfokus pada pemberian nasihat, terbatas menangani siswa bermasalah atau sakit yang dianggap abnormal, bekerja secara individual tanpa kolaborasi, serta dianggap melakukan pekerjaan yang sepele atau hanya menangani masalah ringan. Kesalahpahaman lain adalah penyamaan layanan konseling dengan praktik dokter atau psikiater, ekspektasi bahwa hasil konseling harus langsung terlihat, menganggap semua masalah memiliki penyelesaian yang sama, serta menitikberatkan kegiatan pada penggunaan instrumen semata.

Kesalahpahaman tersebut muncul karena beberapa faktor, antara lain: kurangnya pemahaman yang tepat tentang bimbingan dan konseling dari kepala sekolah maupun guru, masih digunakannya istilah “bimbingan penyuluhan” yang sudah tidak relevan, persepsi bahwa kegiatan BK masih asing di sekolah, serta rendahnya profesionalisme sebagian guru BK akibat latar belakang pendidikan non-sarjana Bimbingan dan Konseling (Deliani, 2018).

Jika dilihat dari jumlah ketersediaan guru Bimbingan dan Konseling (BK) di Indonesia, jumlahnya masih tergolong rendah. Data yang dirilis oleh Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) menunjukkan bahwa tidak semua sekolah memiliki guru BK. Bahkan, jumlah guru BK di Indonesia hanya sekitar 33.000 orang untuk melayani 18,8 juta siswa, sehingga rasio guru BK terhadap siswa mencapai 1:570, jauh dari standar ideal 1:150 siswa (Pusat Standar & Kebijakan Pendidikan [PSKP], Kemendikbudristek RI, 2022). Kondisi ini menambah beban kerja guru BK karena jumlah siswa yang dilayani tidak sebanding dengan kapasitas ideal. Permasalahan ini menimbulkan keprihatinan di kalangan praktisi

maupun akademisi, terutama terkait dengan kesalahpahaman dan keterbatasan jumlah guru BK. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan BK di sekolah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pithriani, Apriatama, & Ginting (2024) pada 11 Sekolah Menengah Pertama di Palangka Raya menunjukkan bahwa guru BK menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan pengembangan layanan BK berdiferensiasi. Kendala tersebut meliputi keterampilan guru dalam memanfaatkan teknologi yang masih rendah, kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan, serta ketiadaan regulasi yang jelas mengenai implementasi Rencana Program Layanan BK (RPLBK) berdiferensiasi. Temuan ini menunjukkan pentingnya penelitian lanjutan untuk mengungkap hambatan-hambatan yang lebih luas, baik dari sisi guru BK, pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, maupun stakeholder lain yang turut berperan dalam mendukung keberhasilan layanan BK di sekolah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam memberikan layanan di sekolah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara holistik melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian dalam kondisi alamiah (Safarudin et al., 2023). Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertugas merancang pedoman pengumpulan data, melakukan interaksi dengan informan, sekaligus menganalisis data yang diperoleh.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur. Wawancara jenis ini dipilih karena memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk menggali informasi lebih mendalam, di samping tetap mengacu pada butir-butir pertanyaan yang telah dirancang dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara tersebut disusun berdasarkan fokus penelitian, yaitu mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan layanan BK di sekolah. Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh informasi terkait pengalaman masa lalu, kondisi yang sedang berlangsung, serta potensi tantangan yang mungkin dihadapi di masa mendatang (Nur & Utami, 2022).

Subjek penelitian adalah seorang guru BK berinisial "NR" yang bertugas di salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Palangka Raya. Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu (Suriani & Jailani, 2023). Guru tersebut dipilih karena merupakan guru tetap di sekolah dan memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa, sehingga dinilai dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama sebagaimana dikemukakan oleh Miles & Huberman, yaitu: (1) reduksi data, yaitu proses memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari wawancara sesuai dengan fokus penelitian; (2) penyajian data, yaitu mengorganisasi data dalam bentuk narasi deskriptif sehingga memudahkan peneliti memahami konteks secara menyeluruh; dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu tahap interpretasi untuk menemukan pola, makna, serta simpulan terkait hambatan-

hambatan layanan BK yang dihadapi guru di sekolah (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik validitas data melalui member checking dan triangulasi. Member checking dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada narasumber untuk memastikan kesesuaian informasi. Sementara itu, triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data wawancara dengan dokumen pendukung, seperti catatan program BK sekolah, serta pengamatan lapangan mengenai kondisi ruang dan sarana prasarana layanan BK. Dengan tahapan tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmasi yang memadai sebagai syarat penelitian kualitatif yang baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK berinisial "NR" di salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Palangka Raya, ditemukan sejumlah hambatan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Hambatan tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu stakeholder, peserta didik, serta tugas tambahan dan faktor pendukung lainnya.

#### 1. Hambatan dari Stakeholder

Guru BK menyampaikan bahwa ia tidak memiliki jam layanan khusus di kelas, sehingga pelaksanaan program BK seringkali hanya dilakukan ketika guru mata pelajaran berhalangan hadir. Hal ini mengurangi efektivitas program yang seharusnya berjalan secara sistematis. Selain itu, guru mata pelajaran belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi guru BK, sehingga kerap terjadi salah persepsi. Misalnya, ada guru yang masuk ke ruang konseling saat proses konseling sedang berlangsung, bahkan

memberi nasihat langsung kepada siswa tanpa mengetahui latar belakang masalah yang dialami. Hambatan lain muncul dari wali kelas dan guru piket yang cenderung menyerahkan sepenuhnya permasalahan siswa kepada guru BK, termasuk masalah sederhana yang sebenarnya dapat ditangani di tingkat kelas. Guru BK juga kerap menerima tugas tambahan di luar fungsi utamanya, misalnya mengurus siswa sakit atau kasus kehilangan barang. Situasi ini menambah beban kerja sekaligus menurunkan fokus dalam pemberian layanan inti bimbingan dan konseling.

#### 2. Hambatan dari Peserta Didik

Dari sisi peserta didik, hambatan yang dihadapi adalah jumlah siswa yang terlalu besar. Guru BK "NR" membimbing sekitar 315 siswa, jauh melampaui rasio ideal yaitu 1 guru BK berbanding 150 siswa. Kondisi ini membuat layanan individual sulit diberikan secara menyeluruh. Selain itu, terdapat peserta didik yang kurang kooperatif dalam mengikuti layanan BK, misalnya enggan terbuka, sering berbohong, atau menunjukkan perilaku membolos dan merokok. Kurangnya keterbukaan ini membuat guru BK kesulitan merancang intervensi yang tepat, serta memperpanjang waktu penyelesaian masalah siswa.

#### 3. Hambatan dari Tugas Tambahan dan Faktor Pendukung Lainnya

Selain dua aspek di atas, hambatan lain datang dari faktor struktural dan sarana pendukung. Guru BK juga merangkap tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, yang menuntutnya menangani tata tertib sekolah. Peran ganda ini sering menimbulkan konflik peran: di satu sisi guru BK harus tampil ramah agar siswa terbuka, namun di sisi lain sebagai wakil kesiswaan ia dianggap sebagai sosok yang menakutkan karena sering berhubungan dengan penegakan aturan. Dari segi fasilitas, ruang BK memang tersedia tetapi

belum memenuhi standar, bahkan sering difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang sekolah. Selain itu, perubahan kurikulum menuntut penyesuaian format layanan baru yang membutuhkan waktu adaptasi cukup panjang. Hambatan lain adalah keterbatasan sumber referensi, karena buku-buku pendukung layanan BK di sekolah sangat terbatas, sehingga guru BK terkadang menggunakan dana pribadi untuk membeli bahan bacaan tambahan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat dikelompokkan menjadi: (1) kurangnya dukungan dan pemahaman stakeholder mengenai peran guru BK, (2) jumlah peserta didik yang terlalu besar serta perilaku sebagian siswa yang tidak kooperatif, dan (3) beban tugas tambahan serta keterbatasan sarana, kurikulum, dan referensi. Hambatan-hambatan ini berdampak pada berkurangnya fokus, efektivitas, dan kualitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

**Tabel 1** Hambatan dalam Pemberian Layanan BK

No	Aspek	Hambatan
1	Stakeholder	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru BK tidak mempunyai jam layanan masuk kelas.</li> <li>2. Guru-guru tidak mengerti tugas &amp; fungsi guru BK</li> <li>3. Wali kelas &amp; guru piket menyerahkan sepenuhnya permasalahan siswa kepada guru BK</li> <li>4. Guru BK mendapat tugas diluar tugas &amp; fungsinya</li> </ol>
2	Peserta didik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik yang dibimbing mencapai 315 siswa sedangkan normalnya adalah 150 siswa.</li> <li>2. Terdapat peserta didik yang tidak dapat bekerja sama dalam pemberian layanan BK</li> </ol>
3	Tugas tambahan & lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru BK memiliki tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan</li> <li>2. Ruang BK yang belum beroperasi dengan optimal karena keterbatasan sarana &amp; prasarana</li> <li>3. Perubahan kurikulum yang menuntut penyesuaian layanan dalam waktu yang cukup lama</li> <li>4. Buku referensi layanan BK yang kurang memadai</li> </ol>

## PEMBAHASAN

### Stakeholders

Dalam menjalankan tugas guru BK tidak bekerja sendiri. Untuk memberikan layanan konsultasi dan konseling di sekolah, guru BK dapat melibatkan orang lain, termasuk administrator. Sebagai pimpinan sekolah, kepala sekolah bekerja sama dengan guru BK, terutama dalam hal pemberian bantuan moral dan non-moral. Menurut Ludin, kepala sekolah memiliki peranan sebagai pengawas dan pemerhati agar proses layanan bimbingan dan konseling dari perencanaan hingga pelaksanaan serta evaluasi dan tindak lanjut berjalan dengan baik. Kepala sekolah melakukan fungsi koordinasi dengan guru BK terkait kebutuhan dan waktu pelaksanaan program bimbingan dan konseling untuk memandirikan peserta didik (Fithroni & Putranti, 2020). Segala permasalahan yang ditemui oleh guru BK disampaikan kepada kepala sekolah agar menemukan solusi bersama. Untuk memastikan bahwa kegiatan dan fungsi berjalan dengan lancar, kepala sekolah mengawasi semua guru (Ramli, 2023). Guru mata pelajaran memberikan kontribusi terhadap keberhasilan layanan bimbingan dan konseling selain kepala sekolah. Dalam rangka membantu program layanan bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran berperan sebagai pendidik. Rekan guru BK termasuk guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran bertanggung jawab untuk mengajar dan mendidik siswanya. Sebagai pembimbing, pengingat, motivator, pemberi masukan, dan penggerak pengembangan diri siswa, guru mata pelajaran dapat membantu guru BK dalam membantu siswa mengembangkan nilai-nilai moral dan etika mereka (BP et al., 2020). Dengan prinsip dasar suka rela guru mata pelajaran dan guru BK bersama-sama membimbing peserta didik secara langsung dan kontinu (Mulyati et al, 2020). Oleh karena itu guru BK tidak hanya mengandalkan diri sendiri dalam memberi layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Guru BK

melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Kemudian yang tak kalah penting adalah wali kelas sebagai tokoh yang membantu guru BK agar layanan bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan baik dan efektif dalam kelas (Atmaja et al, 2019). Komunikasi wali kelas dan guru BK harus selalu berkelanjutan untuk memantau kemajuan peserta didik. Wali kelas dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sederhana di dalam kelas sebelum lebih lanjut ditangani oleh guru BK. Wali kelas juga dapat memberi informasi terkait berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik terutama permasalahan dalam bidang pembelajaran. Namun di dalam kenyataannya di lapangan peranan kepala sekolah, guru, dan wali kelas sering membuat suatu kerancuan dalam proses pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

Berdasarkan wawancara dengan satu guru BK "NR" di salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri di kota Palangka Raya menyampaikan bahwa :

*"kami sebagai guru Bimbingan dan konseling tidak mempunyai jadwal masuk kelas untuk memberi layanan BK di sekolah. Kami hanya melaksanakan layanan BK dalam kelas ketika guru mata pelajaran tidak masuk mengajar. Kemudian kendala lainnya guru-guru disini terkadang kepo dengan siswa yang sedang melakukan konseling. Mereka secara tiba-tiba masuk ruang BK dan ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh siswa dan lebih parahnya lagi guru tersebut langsung memberi nasihat tanpa mengetahui permasalahan yang sebenarnya dialami oleh siswa. Kemudian setiap ada permasalahan wali kelas dan guru piket menyerahkan langsung ke guru BK padahal masalah yang dihadapi bisa ditangani. Guru BK di sekolah ini juga dibuat multi talenta untuk mengurus siswa sakit dan kehilangan uang sehingga ini sangat memberatkan tugas sebagai guru BK".*

Dari pernyataan guru BK diatas dapat disimpulkan beberapa kendala yang ditemukan antara lain : 1) Guru bimbingan dan konseling melaksanakan program di kelas pada waktu senggang, khususnya ketika guru mata pelajaran tidak dapat hadir mengajar,

karena tidak ada waktu untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling di kelas; 2) Kurangnya pemahaman guru-guru tentang tugas dan fungsi guru BK. Sewaktu-waktu guru masuk ke ruang konseling ketika konseling berlangsung dengan tujuan mengetahui identitas peserta didik dan beberapa guru memberi nasihat secara langsung tanpa mengetahui latar belakang permasalahan yang dialami oleh peserta didik. 3) Wali kelas dan guru piket secara penuh menyerahkan tugas membimbing peserta didik kepada guru BK walaupun permasalahan sederhana yang sebenarnya dapat ditangani sendiri. 4) Tugas dan tanggung jawab yang bukan merupakan bagian dari guru BK diserahkan seperti mengurus siswa yang sakit dan mengurus siswa yang kehilangan uang. Temuan permasalahan ini didukung dari hasil penelitian sebelumnya yang menjelaskan salah satu faktor yang menjadi penghambat layanan bimbingan dan konseling adalah faktor dari luar seperti tidak tersedianya waktu layanan dan terbatasnya waktu pelayanan di kelas (Suryani, R., Said, A., & Sukmawati, I., 2019). Sehingga sangat penting bagi guru BK memiliki rekan kerja yang dapat mengerti dan dapat diajak kerja sama dalam melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Selain itu, wali peserta didik sangat berperan dalam layanan bimbingan dan konseling.

Wali peserta didik hidup dan tinggal bersama siswa lebih mengenal berbagai karakter yang dimiliki oleh anaknya. Sehingga informasi-informasi tersebut dapat membantu guru BK dalam menyusun program yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Wali peserta didik berperan sebagai motivator siswa dalam belajar dan membantu siswa dalam pembentukan karakter, serta membantu siswa mencapai tugas perkembangannya secara maksimal (Indriani et al, 2021; Amin & Nur Syariful, 2019; Harita et al, 2022). Kemudian wali peserta didik juga

harus selalu menjaga komunikasi agar dapat memantau perkembangan dan memberi pujian ketika peserta didik berperilaku baik serta mampu memberi hukuman yang bersifat mendidik untuk mendisiplinkan (Situmorang et al 2024).

### **Peserta Didik**

Peserta didik merupakan individu yang belum memasuki usia dewasa dan memiliki berbagai potensi dasar yang perlu dikembangkan. Mereka adalah subjek utama dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Tugas utama guru BK adalah membantu peserta didik mencapai tumbuh kembang yang tercantum dalam Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik (SKKPD) (Ditjen, 2016). SKKPD berhubungan dengan pengembangan diri dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier, khususnya dalam perencanaan karier (Nove, Basuki, & Sunaryo, 2021).

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan berbagai instrumen asesmen, seperti Alat Ungkap Masalah (AUM), Daftar Cek Masalah (DCM), instrumen perencanaan karier (Nove, 2024), sosiometri, dan instrumen lainnya. Hasil asesmen kemudian diolah menjadi materi layanan yang dimasukkan dalam program tahunan maupun program semester bimbingan dan konseling. Program layanan ini akan berhasil optimal apabila peserta didik bersedia berkontribusi aktif dalam setiap kegiatan. Oleh karena itu, kesadaran dan komitmen tinggi dari peserta didik sangat diperlukan agar guru BK dapat membantu mereka mencapai SKKPD.

Salah satu strategi yang digunakan adalah melatih sebagian peserta didik sebagai konselor sebaya untuk membantu teman-temannya dalam mengatasi masalah maupun mengembangkan diri (Salmiati et al., 2018). Kehadiran konselor sebaya membantu memperluas jangkauan layanan BK sekaligus mengatasi keterbatasan jumlah guru BK di sekolah (Ridha, 2019).

Dengan adanya kesadaran dan keterbukaan terhadap masalah yang dihadapi, peserta didik dapat belajar keterampilan baru, terutama dalam strategi pemecahan masalah (problem solving). Sebaliknya, apabila peserta didik tidak terbuka, maka permasalahan sulit terselesaikan, bahkan dapat muncul perilaku negatif seperti berbohong.

Hal serupa ditemukan di salah satu SMP Negeri di Kota Palangka Raya, di mana seorang guru BK menyampaikan:

*“Beberapa permasalahan yang sering saya tangani di antaranya siswa sering berbohong, merokok, membolos, sering tidak hadir sekolah, dan mencoba-coba untuk berpacaran.”*

Fenomena kenakalan remaja ini sering menjadi tantangan bagi guru BK sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif agar layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan perkembangan remaja pada zamannya. Guru BK bersama konselor sebaya harus sigap dalam mencegah degradasi moral remaja melalui layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan (Setyoningsih, 2018). Penelitian Susanti (2022) juga menegaskan pentingnya peranan guru BK dalam membantu mengatasi degradasi moral remaja, terutama terkait kenakalan remaja, dengan berfungsi sebagai pembimbing, pengingat, pengarah, maupun penasihat.

Selain aspek kompetensi, jumlah guru BK di sekolah juga harus sebanding dengan jumlah peserta didik yang dilayani. Menurut standar, seorang guru BK idealnya membimbing 150 siswa (Sukardi, 2021). Namun, pada praktiknya, banyak guru BK menangani jumlah siswa jauh lebih besar. Misalnya, seorang guru BK di salah satu SMP Negeri di Palangka Raya mengungkapkan:

*“Jumlah peserta didik yang saya bimbing terlalu banyak, mencapai 315 siswa, sehingga tidak semua bisa saya tangani secara individu. Kami juga tidak memiliki jadwal masuk kelas untuk memberikan layanan BK. Dalam pelaporan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), hanya 150 siswa yang*

*dilaporkan, padahal kondisi di lapangan berbeda. Ditambah lagi, saya mendapat tugas tambahan lainnya.”*

Hal ini sejalan dengan temuan Susanti (2022) bahwa salah satu faktor penghambat layanan BK adalah ketidakseimbangan rasio guru BK dengan jumlah siswa. Atmaja, Harapan, & Nurlela (2019) menyarankan keterlibatan wali kelas sebagai solusi alternatif. Wali kelas dapat berperan dalam menyelesaikan masalah sederhana, membantu mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar, serta memberikan informasi mengenai kebutuhan siswa kepada guru BK. Dengan keterlibatan wali kelas, guru BK dapat menjalankan perannya secara lebih optimal.

### **Tugas Tambahan dan Lainnya**

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) hendaknya berfokus pada pemberian layanan bimbingan dan konseling yang mencakup kegiatan di kelas, di luar kelas, hingga kunjungan rumah. Hal ini menuntut ketersediaan waktu penuh dari guru BK agar layanan dapat terlaksana dengan optimal. Namun, kenyataannya di beberapa sekolah masih terjadi kekurangan guru mata pelajaran, sehingga kepala sekolah memberdayakan guru-guru yang ada, termasuk guru BK, untuk mengisi kekosongan tersebut.

Seorang guru BK berinisial “NR” di salah satu SMP Negeri di Kota Palangka Raya menyampaikan:

*“Padahal tugas guru BK yang saya jalani itu berat, tetapi saya justru diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan yang mengurus penegakan tata tertib sekolah. Tugas tambahan ini sering bertentangan dengan peran saya sebagai guru BK. Sebagai guru BK saya harus tampil ramah dan terbuka agar siswa mau bercerita tentang permasalahan mereka. Namun, di sisi lain, sebagai Waka Kesiswaan saya justru ditakuti siswa. Karena itu, tahun depan saya berencana mundur dari posisi tersebut agar dapat fokus menjalankan tugas sebagai guru BK.”*

Tugas tambahan yang diberikan pimpinan sekolah sering kali menimbulkan benturan peran. Hal ini menimbulkan persepsi keliru bahwa guru BK identik dengan sosok yang galak, sering menghukum siswa, dan berperan seperti “polisi sekolah”. Dalam beberapa kasus, bahkan terjadi kerancuan antara tugas Waka Kesiswaan dengan guru BK, misalnya dalam hal pengelolaan peminatan dan penjurusan siswa yang sejatinya merupakan ranah guru BK (Sunariyah, 2020). Untuk mencegah peran ganda yang kontraproduktif, guru BK sebaiknya direkrut sesuai dengan latar belakang pendidikan sarjana bimbingan dan konseling. Selain itu, guru BK perlu berkolaborasi dengan orang tua serta pemangku kepentingan lain agar pemberian layanan tidak terbebani oleh tugas tambahan (Kholilah, Nur, & Ari Khusumadewi, 2018). Bahkan, orang tua dapat berfungsi sebagai konselor utama di rumah dalam mendampingi anak-anak mereka (Sihabudin, 2015).

Selain sinergi antar-stakeholder, sarana dan prasarana bimbingan dan konseling juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas layanan. Idealnya, ruang konseling terdiri atas ruang konseling individu, ruang bimbingan kelompok, ruang konseling kelompok, ruang tamu, serta dilengkapi fasilitas data, pustaka konseling (bibliocounseling), serta alat pengumpulan dan penyimpanan data (Permendikbud No. 111 Tahun 2014; Maribun & Pohan, 2021). Sarana tersebut berperan penting dalam mendukung efektivitas dan kenyamanan layanan konseling. Zarisman (2023) menegaskan bahwa prasarana BK yang memadai meningkatkan kualitas layanan yang efektif, relevan, dan holistik.

Namun, temuan di salah satu SMP Negeri di Palangka Raya menunjukkan bahwa meskipun ruang BK sudah tersedia, masih terdapat kendala lain. Guru BK “NR” menyampaikan bahwa perangkat sekolah seperti pengeras suara disimpan di ruang BK sehingga

sering mengganggu jalannya kegiatan. Selain itu, instrumen BK masih terbatas dan sulit digunakan, sementara buku-buku referensi sangat langka. Akibatnya, guru BK harus menggunakan dana pribadi untuk membeli buku penunjang.

Masalah ini seharusnya dapat diatasi dengan pemanfaatan teknologi digital. Menurut Wahyuni (2022), perubahan kurikulum justru dapat membawa sisi positif bagi guru BK, karena mendorong inovasi, kreativitas, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyediaan informasi dan instrumen asesmen. Teknologi memungkinkan guru BK menyusun instrumen melalui aplikasi interaktif yang lebih mudah digunakan. Selain itu, teknologi internet dapat menjadi sumber referensi alternatif untuk mengatasi keterbatasan buku fisik. Hal ini sejalan dengan penelitian Ilfana & Herdi (2022) yang menjelaskan bahwa penguasaan teknologi informasi dapat mengatasi hambatan layanan BK, misalnya ketiadaan ruang konseling. Melalui platform daring, layanan konseling dapat dilakukan secara online sehingga keterbatasan sarana fisik tidak lagi menjadi penghalang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan dan konseling di sekolah masih menghadapi sejumlah hambatan yang cukup signifikan. Hambatan tersebut meliputi kurangnya pemahaman stakeholders terhadap tugas dan fungsi guru BK, sehingga peran guru BK kerap kali dipersepsikan keliru. Selain itu, jumlah peserta didik yang ditangani oleh seorang guru BK sering kali melebihi standar ideal 150 siswa, sehingga menyebabkan pelayanan tidak berjalan secara maksimal. Guru BK juga terbebani dengan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan yang menyita banyak waktu dan tenaga, sehingga mengurangi fokus dalam memberikan layanan

bimbingan dan konseling. Hambatan lain yang ditemukan adalah ketersediaan ruang BK yang meskipun sudah ada, namun belum memenuhi standar yang ditetapkan dan bahkan kerap difungsikan sebagai ruang penyimpanan barang-barang sekolah. Perubahan kurikulum juga menjadi tantangan tersendiri karena menuntut guru BK untuk melakukan penyesuaian format layanan yang memerlukan waktu cukup lama. Selain itu, keterbatasan buku referensi sebagai sumber dukungan layanan turut menghambat efektivitas program bimbingan dan konseling di sekolah.

Kendala-kendala tersebut telah disampaikan oleh guru BK kepada kepala sekolah dengan harapan dapat dilakukan perbaikan pada semester berikutnya. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pemimpin hendaknya memberikan perhatian serius terhadap berbagai hambatan yang dialami guru BK dan bersama-sama mencari solusi yang tepat agar layanan bimbingan dan konseling dapat berjalan optimal. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian mengenai hambatan guru BK dilakukan dengan melibatkan populasi yang lebih luas pada tingkat Sekolah Menengah Pertama, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang dihadapi.

## REFERENSI

- Amin, N. S. (2019). Peranan Orang Tua Dalam Masa Perkembangan Pubertas Anak di SMP Negeri 4 Kota Bima Tahun Pelajaran 2018-2019. *Guiding World (Bimbingan Dan Konseling)*, 2(1), 56-65. DOI: <https://doi.org/10.33627/gw.v2i1.284>
- Anisah, L., Rachmawati, D. A., Dewi, A. K., Nove, A. H., Kurniadi, P., & Marzuki, D. (2024). Psikologi Pendidikan. Sumatera Barat : CV. Pustaka Inspirasi Minang
- Apriatama, D. (2018). Faktor-faktor yang menghambat siswa dalam memanfaatkan layanan informasi karir di SMP Negeri 6 Palangkaraya. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia*, III, 2, 43-48. DOI: <http://dx.doi.org/10.26737/jbki.v3i2.735>

- Ardimen, A. (2018). Pengembangan kepribadian konselor berbasis asmaul husna dalam pelayanan konseling. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 15(2), 102-115. DOI: <https://doi.org/10.14421/hisbah.2018.152-07>
- Atmaja, S. D., Harapan, E., & Nurlela, N. (2019). Implementasi Peran Wali Kelas Dalam Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling Di Smk Negeri 1 Benakat. *Jurnal Wahana Konseling*, 2(2), 125-136. DOI: <https://doi.org/10.31851/juang.v2i2.4700>
- Bp, S. A., Ekasyafutra, E., Suhaili, N., Mudjiran, M., & Nirwana, H. (2021). Peranan Guru Dalam Bimbingan Dan Konseling Untuk Pembentukan Nilai Moral Pada Peserta Didik Di Sekolah Dasar. *Ensiklopedia of Journal*, 3(3), 220-225. DOI : <https://doi.org/10.33559/eoj.v3i3.780>
- Deliani, N. (2018). Konsepsi (kesalahpahaman) bimbingan dan konseling dalam pendidikan. *AL-IRSYAD: JURNAL BIMBINGAN KONSELING ISLAM*, 1(2).
- Dudung, A. (2018). Kompetensi profesional guru. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 5(1), 9-19. DOI : <https://doi.org/10.21009/JKKP.051.02>
- Guru, D., & KEMNDIKBUD, T. K. (2016). Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling SMA. *Jakarta: Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan KEMNDIKBUD*.
- Harita, A., Laia, B., & Zagoto, S. F. L. (2022). Peranan guru bimbingan konseling dalam pembentukan karakter disiplin siswa SMP Negeri 3 Onolalu tahun pelajaran 2021/2022. *Counseling For All: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 2(1), 40-52. DOI: <https://doi.org/10.57094/jubikon.v2i1.375>
- Ilfana, A., & Herdi, H. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah: Problematika dan Solusinya. *Jurnal Paedagogy*, 9(2), 241-247. DOI: <https://doi.org/10.33394/jp.v9i2.3985>
- Istiyannah, N. (2020). Pemantapan minat siswa terhadap pilihan program studi di perguruan tinggi melalui layanan penguasaan konten dengan teknik Focus Group Discussion. *Jurnal Prakarsa Paedagogia*, 3(2). DOI : 10.24176/jpp.v3i2.5743
- Kholilah, N., & Khusumadewi, A. (2018). Implementasi Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar Islam Terpadu At-Taqwa Surabaya. *Jurnal BK Unesa*, 8(3), 36-44.
- Lisabe, C. M. (2019). Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling dalam Melaksanakan Program Kerja Bimbingan dan Konseling. *Linear: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 1-12. DOI : <https://doi.org/10.53090/jlinear.v3i2.138>
- Marimbun, M., & Pohan, R. A. (2021). Gambaran Sarana dan Prasarana Bimbingan dan Konseling pada Sekolah Menengah Negeri di Indonesia. *ENLIGHTEN: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(2), 76-87. <https://doi.org/10.32505/enlighten.v4i2.3365>
- Mukhtar, A., & Luqman, M. D. (2020). Pengaruh kompetensi guru terhadap kinerja guru dan prestasi belajar siswa di kota makassar. *Idaarah*, 4(1), 1-15. DOI : <https://doi.org/10.24252/idaarah.v4i1.13899>
- Mulyati, S., & Kamaruddin, K. (2020). Peran guru dalam pelaksanaan bimbingan konseling. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(02), 172-184. DOI: <https://doi.org/10.46963/alliqo.v5i02.241>
- Nove, A. H. (2024). Pengembangan Instrumen Perencanaan Karir Sekolah Kejuruan. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Pandohop*, 4(1), 1-6. DOI : <https://doi.org/10.37304/pandohop.v4i1.12166>
- Nove, A. H., Basuki, A., & Sunaryo, S. A. I. (2021). Efektivitas teknik diskusi dalam bimbingan kelompok untuk membantu dalam perencanaan karir siswa. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 9(4), 366-371. DOI : [10.29210/143100](https://doi.org/10.29210/143100)
- Nur, A., & Utami, F. Y. (2022). Proses dan langkah penelitian antropologi: Sebuah literature review. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 3(1), 44-68. DOI: <https://doi.org/10.55623/ad.v3i1.109>
- Permadin, M. L. P. (2023). Penerapan Konseling Behavioral Teknik Self Management untuk Meningkatkan Penyesuaian Diri pada Siswa Tahun Pertama di SMP Negeri. *Jakarta : UNJ*
- Pithriani, P., Apriatama, D., & Ginting, H. F. B. (2024). Hambatan Guru BK Dalam Mengembangkan Rencana Pemberian Layanan BK (RPLBK) Berdiferensiasi. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Pandohop*, 4(1), 67-76. <https://doi.org/10.37304/pandohop.v4i1.15588>

- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77-84. DOI: <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1536>
- Ramli, A., Fahrudin, A., Nove, A. H., Dewi, R. D. L. P., Isrohmaty, I., & Rachman, R. S. (2023). Analisis Manajemen Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Sekolah. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 4263-4271. DOI : <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.23616>
- Ramli, M. (2015). Hakikat pendidik dan peserta didik. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 5(1). DOI : <https://doi.org/10.18592/jtipai.v5i1.1825>
- Ridha, A. A. (2019). Penerapan konselor sebaya dalam mengoptimalkan fungsi layanan bimbingan konseling di sekolah. *Jurnal Psikologi*, 15(1), 25-34. DOI : <http://dx.doi.org/10.24014/jp.v15i1.6549>
- S.Kurnia,A, Kur'ani,N, Nove .H.A.,Rahmawati A., Dewi K.A. (2025). Psikologi Perkembangan Manusia. Sumatera Barat : CV Hei Publishing Indonesia.
- Salmiati, S., Hasbahuddin, H., & Bakhtiar, M. I. (2018). Pelatihan Konselor sebaya sebagai strategi pemecahan masalah siswa. *Matappa*, 1(1), 36-41. DOI: <https://doi.org/10.53696/27214834.242>
- Setyoningsih, Y. D. (2018, August). Tantangan Konselor di era milenial dalam mencegah degradasi moral remaja. In *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling* (Vol. 2, No. 1, pp. 134-145).
- Sihabudin, M. (2015). Peranan orang tua dalam bimbingan konseling siswa. *Jurnal Kependidikan*, 3(2), 123-137. DOI : <https://doi.org/10.24090/jk.v3i2.903>
- Situmorang, Y. N., Nove, A. H., Manik, R. B., Giawa, J. S. W., Hutauruk, F., & Pakpahan, D. R. (2024). Peran Orang Tua Dalam Mendidik: Studi Kasus Kenakalan Remaja. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Pandohop*, 4(2), 10-18. DOI : <https://doi.org/10.37304/pandohop.v4i1.12166>
- Somantri, D. (2021). Abad 21 pentingnya kompetensi pedagogik guru. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 18(02), 188-195. DOI: <https://doi.org/10.25134/equi.v18i2.4154>
- Sukadari, S. (2021). Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar Sangat Dibutuhkan. *Elementary School: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran ke-SD-an*, 8(1), 67-â. DOI: <https://doi.org/10.31316/esjurnal.v8i1.1204>
- Sunariyah, I. (2020). Persepsi stakeholders mengenai guru bimbingan dan konseling di MA Al-Falah Sumber Gayam. *Madura : IAIN Madura*. <http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/80>
- Suriani, N., & Jailani, M. S. (2023). Konsep populasi dan sampling serta pemilihan partisipan ditinjau dari penelitian ilmiah pendidikan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24-36. DOI: <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>
- Suryani, R., Said, A., & Sukmawati, I. (2019). Hambatan Yang Dialami Guru BK Untuk Melaksanakan Instrumen Non-Tes Dalam Pelayanan BK Dan Usaha Mengatasinya. *Biblio Couns: Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan*, 2(1), 33-40. DOI: <https://doi.org/10.30596/bibliocouns.v2i1.3035>
- Susanty, F. (2022). Peran Guru BK dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling serta Mengatasi Kenakalan Siswa di SMA IT Raudhatul Ulum Sakatiga Kabupaten Ogan Ilir. *PUSTAKA: Jurnal Bahasa dan Pendidikan*, 2(3), 90-110. DOI: <http://dx.doi.org/10.56910/pustaka.v2i3.151>
- Wahyuni, E. D. S. (2022). Bimbingan dan Konseling di Era disrupsi. *WIDYA DIDAKTIKA-Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 1(2), 12-21. DOI: <https://doi.org/10.54840/juwita.v1i2.65>
- Zarisman, E. (2023). Peran Prasarana BK untuk Meningkatkan Kualitas Layanan dan Kenyamanan dalam konseling Bagi Siswa. *GUIDING WORLD (BIMBINGAN DAN KONSELING)*, 6(2), 134-143. DOI: <https://doi.org/10.33627/gw.v6i2.1333>